

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMDA DAN TEMUAN AUDIT BPK  
TERHADAP KINERJA PEMDA KABUPATEN DI PULAU SUMBA**

**Samuel Christian Ara**

*Titiek Herwanti*

*Endar Pituringsih*

Universitas Mataram  
samuelara22@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

*This research is aimed at examining and analyzing the effect of the characteristics of the local government and BPK audit findings on the performance of local governments on the island of Sumba. Local government performance is measured by a score results of Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). This research was classified as associative research. The samples used were all local governments on the island of Sumba, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat and Sumba Barat Daya during the period of 2009-2014. The Analysis employed multiple linear regression. The research showed that the variable characteristics of the local government who described the wealth level of local government, the level of dependence on central government, capital expenditures and audit findings on the performance of local governments on the island of Sumba. The implications of this research theoretically contribute in the field of public sector accounting, particularly at the local government in governance. Practically provide information and advice to the local government in terms of financial management. In this research provide information policy as a basis for consideration in making policy as an effort to improve the performance of local governments on the island of Sumba.*

**Keywords :** *characteristics of local government, local government performance, the audit findings, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).*

**PENDAHULUAN**

Bergesernya paradigma manajemen pemerintahan yang berorientasi proses menjadi berorientasi hasil telah ikut mereformasi sistem pengelolaan keuangan negara baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia yang diawali dengan keluarnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah membawa banyak perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan negara.

Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengelola potensi-potensi yang ada pada daerahnya untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinyatakan sebagai tingkat kekayaan (*wealth*) daerah tersebut, (Abdullah,2004).

Salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari dana APBN adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah bersifat "Block Grant" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian DAU akan dipantau penggunaannya oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, semakin besar DAU maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga hal ini diharapkan akan membuat Pemda semakin berhati-hati dalam pelaksanaan program kerjanya. Dengan demikian, semakin besar DAU akan membuat kinerja Pemda semakin baik. (Bastian, 2009).

Selanjutnya, Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Halim, 2004:73).

*Stewardship Theory* memandang bahwa Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga negara yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Sejalan dengan penjelasan tersebut di atas, Undang-undang No.32/2004 selain memberikan kewenangan otonomi kepada Pemerintah Daerah, juga mewajibkan tiap Kepala Daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. Pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 2007 (PP No.3/2007) tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur tanggung jawab yang sangat penting. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 (UU No. 15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

*Signaling Theory* menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah oleh rakyat memiliki kewajiban untuk menunjukkan signal kepada masyarakat. Pemerintah akan memberikan signal ke masyarakat dengan cara memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas, peningkatan sistem internal kontrol serta pengungkapan yang lebih lengkap atas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan. Pelaporan keuangan yang berkualitas akan menunjukkan prestasi kinerja pemda yang optimal kepada publik (Pupita dan Martani, 2010).

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasaki (2012). Pada penelitian ini peneliti menambahkan satu variabel independen yang termasuk dalam karakteristik pemerintah daerah, yaitu variabel Belanja Modal. Alasan peneliti menambahkan belanja modal kedalam karakteristik pemerintah daerah sebagai variabel

independen adalah bahwa, salah satu cara melihat bagaimana tata kelola (*governance*) bekerja dengan baik dengan melihat pola belanja modal pemerintah daerah. Pola belanja ini merupakan “pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya” (Pasal 53 ayat (1) Permendagri 13/2006).

## **TEORI DAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba**

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), (Abdullah 2004). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Sejalan dengan penjelasan UU No. 33 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Penelitian Julitawati dan Jalaludin (2012), Marfiana dan Kurniasih (2013), Mustikarini dan Fitriasisi (2012) serta Simanullang (2013) yang menemukan bahwa tingkat PAD pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemda. Berdasarkan uraian tersebut dapat diturunkan hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub> : Tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemda kabupaten di Pulau Sumba.**

### **Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba**

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat juga berbeda-beda yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). PAD dan DAU merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo 2001). Robbin dan Austin (1987) memaparkan bahwa *intergovernmental revenue* merepresentasikan tingkat ketergantungan Pemda. Tingkat ketergantungan yang tinggi cenderung meningkatkan tingkat pengungkapan. Berdasarkan *Teori stewardship* menjelaskan bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Ini

mengindikasikan bahwa Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan yang diamanahkan oleh pemerintah pusat kepadanya, sehingga diharapkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Dengan demikian, semakin tinggi DAU dari Pemerintah Pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan Pemda kepada masyarakatnya sehingga kinerja Pemda juga semakin meningkat. Sejalan dengan penjelasan tersebut pada penelitian yang dilakukan oleh Indrarti (2011) yang mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum menunjukkan korelasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Julitawati dan Jalaludin (2012) mengungkapkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Didukung dengan penelitian Marfiana dan Kurniasih (2013) serta penelitian Martani *et,al* (2014) yang menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut dapat diturunkan hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

## **H<sub>2</sub> : Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja Pemda kabupaten di Pulau Sumba**

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba**

Halim (2004:73) mendefinisikan Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoretis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit (Abdulah 2006). Belanja modal yang besar mencerminkan penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Semakin banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah (*steward*) akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (*principal*), sehingga kinerja pemerintah daerah akan lebih baik. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian Marfiana dan Kurniasih 2013 yang menemukan bahwa jumlah belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menjelaskan bahwa pemda dengan total belanja yang besar ternyata kinerjanya semakin tidak baik. Di dukung dengan penelitian Simanullang (2013) yang menguji belanja modal secara parsial menyimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, turunan hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah :

## **H<sub>3</sub> : Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja Pemda kabupaten di Pulau Sumba**

### **Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba**

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu

daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda. Menurut (Hall 2007) audit adalah bentuk dari pembuktian independen yang dilakukan oleh ahli-auditor-yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara internal bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen. Adams (1994) menjelaskan bahwa audit (pemeriksaan) terhadap laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal adalah salah satu bentuk *monitoring* yang dilakukan prinsipal untuk memastikan agen dapat meningkatkan kekayaannya tanpa mengorbankan kepentingan prinsipal. Dalam konteks Indonesia, untuk memastikan pemerintah daerah sebagai (*steward*) telah bekerja secara akuntabel dan transparan. Felix dan Akoko (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perkembangan audit yang baru sangat diperlukan untuk menilai efisiensi dan efektivitas dari kinerja anggaran pemerintah. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Mustikarini dan Fitriasisi (2012) sendiri yang hasil dari penelitiannya membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota, serta penelitian Marfiana dan Kurniasih (2013) yang menyimpulkan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap kinerja pada pemerintah daerah. Dengan demikian, turunan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>4</sub> : Temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja Pemda kabupaten di Pulau Sumba**

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten di Sumba yaitu Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya untuk Tahun Anggaran 2009-2014. . Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), APBD, DAU, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK untuk mendapatkan temuan audit.

### Variabel Penelitian dan Pengukuran

#### Tingkat Kekayaan Daerah

Analisis kinerja keuangan dapat diukur melalui penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan (Halim, 2001:127). Mustikarini dan Fitriasisi (2012) menggunakan PAD dibandingkan dengan total pendapatan sebagai penjelasan untuk pengukuran tingkat kekayaan daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Ardhani, 2011). Untuk mengukur tingkat tingkat kekayaan daerah diukur dengan rumus :

$$\text{Tingkat Kekayaan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

### Tingkat Ketergantungan dengan Pusat

Tingkat ketergantungan dengan pusat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan (Mustikarini dan Fitriyasi: 2012). Menurut Ardhani (2011) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum untuk masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.). Variabel tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat diukur dengan rumus :

$$\text{Tingkat Ketergantungan Dengan Pusat} = \frac{\text{DAU}}{\text{Total Pendapatan}}$$

### Belanja Modal

Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2012) menyatakan belanja modal terhadap total realisasi belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan atau direalisasikan untuk membiayai belanja modal. Dimana realisasi belanja modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Maka pada penelitian ini belanja modal diukur dengan rumus :

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja}}$$

### Temuan Audit BPK

Temuan audit BPK diukur dengan menggunakan hasil temuan audit (dalam rupiah) dibandingkan dengan total anggaran belanja (Mustikarini dan Fitriyasi 2012), variabel temuan audit BPK penelitian ini menggunakan rumus :

$$\text{Temuan Audit BPK} = \frac{\text{Temuan Audit BPK (dalam Rupiah)}}{\text{Total Anggaran Belanja}}$$

### Kinerja Pemerinta Daerah Kabupaten

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skor kinerja Pemda kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh Ditjen Otonomi Daerah dibawah Kementerian Dalam Negeri. Total indeks komposit penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan penjumlahan hasil penilaian yang meliputi indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi. Indeks capaian kinerja diukur dengan menilai IKK, pada aspek tataran pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Adapun *range* nilai skor kinerja Pemda yaitu 0-4 yang terdiri dari empat kategori antara lain Pemda dengan skor 0-0,999= Rendah, skor 1-1,999= Sedang, skor 2-2,999=Tinggi dan skor 3-4= Sangat Tinggi (Permendagri No.73 Tahun 2009).

### Prosedur Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan dengan statistik deskriptif dengan tujuan mengetahui dispersi dan distribusi data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda (*multiple regression analysis*) dengan bantuan program SPSS versi 20. Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan uji asumsi klasik dengan tujuan menguji kelayakan model regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi maupun uji heteroskedasitas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean Statistic	Std. Deviation
T_PAD	24	0,03	0,08	0,04	0,01
TK_DAU	24	0,35	0,77	0,67	0,09
BM	24	0,15	0,49	0,30	0,08
TA_BPK	24	0,00	0,03	0,00	0,00
KINERJA_PD	24	0,63	1,22	1,03	0,10
Valid N (listwise)	24				

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat deskripsi statistik dari variabel dependen dan independen untuk 24 sampel penelitian. Nilai rata-rata kinerja sebesar 1,0317 menjelaskan bahwa secara rata-rata kinerja pemerintah daerah di Pulau Sumba kurang maksimal karena berada pada kriteria prestasi sedang. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat kinerja tinggi adalah pemda Sumba Tengah pada Tahun anggaran 2009 dengan tinggkat skor kinerja sebesar 1,22.

Pemerintah daerah yang memiliki jumlah pendapatan asli daerah terbesar untuk tahun anggaran 2014 adalah kabupaten Sumba Timur sedangkan daerah yang jumlah PAD terkecil adalah kabupaten Sumba Tengah. Rata-rata nilai PAD pemda adalah sebesar 4% yang berarti secara porsi PAD pada total pendapatan pemerintah daerah Di pulau Sumba masih sangat kecil. Bila dibandingkan dengan nilai rata-rata tingkat ketergantungan pada Dana Alokasi Umum sebesar 67% hal ini menjelaskan bahwa porsi DAU pada dalam total pendapatan pemerintah daerah di Pulau Sumba masih sangat besar. Bila ditinjau dari sisi belanja modal, pemda dengan belanja modal terbesar adalah kabupaten Sumba Tengah pada tahun anggaran 2009 hal dipengaruhi dengan baru berdirinya kabupaten tersebut sehingga kebutuhan akan belanja modal yang cukup tinggi untuk menunjang kegiatan pemerintahan. Sedangkan pemerintah daerah dengan belanja modal terkecil adalah kabupaten sumba timur sebesar 15% dari total anggaran belanja yang direalisasikan.

Variabel temuan audit BPK, nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 0,00 dari jumlah temuan audit terhadap total anggaran belanja yang direalisasikan oleh Pemda di pulau Sumba, pemda dengan temuan audit tertinggi adalah Kabupaten Kabupaten Sumba Tengah yaitu sebesar 0,03 dari total anggaran belanja.

### Pengujian Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa besaran nilai *Kolmogorov-smirnov* diperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,951 ( $0,951 > 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen kinerja Pemerintah Daerah di Pulau Sumba dan variabel independen yang dijelaskan dengan tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, belanja modal dan temuan audit BPK pada penelitian ini berdistribusi normal.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00389928
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.085
	Negative	-.106
Kolmogorov-Smirnov Z		.519
Asymp. Sig. (2-tailed)		.951

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF
T_PAD	0,703	1,423
TK_DAU	0,792	1,263
BM	0,726	1,377
TA_BPK	0,773	1,293

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai variabel independen Tingkat Kekayaan Daerah yang ditinjau dari PAD sebesar 1,423 ( $1,423 < 10$ ) maka tidak terdapat multikolinearitas, Tingkat Ketergantungan Dengan Pusat yang ditinjau dari DAU sebesar 1,263 ( $1,263 < 10$ ) maka tidak terdapat multikolinearitas, variabel Belanja Modal sebesar 1,377 ( $1,377 < 10$ ) tidak terdapat multikolinearitas dan variabel Temuan Audit BPK sebesar 1,293 ( $1,293 < 10$ ) tidak terdapat multikolinearitas. Semua variabel independen mempunyai nilai VIF kurang dari 10 ( $VIF < 10$ ) dan nilai *tolerance* semua variabel independen mendekati angka 10. Hal ini menjelaskan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel.

### Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013:139). Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Dari hasil uji heterokedastisitas di atas diperoleh nilai signifikansi untuk semua variabel  $> 0,05$ . Hal ini menjelaskan nilai signifikansi di atas 0,05 dapat disimpulkan data penelitian memenuhi asumsi klasik heterokedastisitas. Berikut ini Tabel 4 menunjukkan hasil uji heterokedastisitas:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Variabel	Sig
T_PAD	0,246
TK_DAU	0,301
BM	0,886
TA_BPK	0,207



**Uji Autokorelasi**

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.999 <sup>a</sup>	.999	.998	.00429	1.839

Hasil pengujian autokorelasi menghasilkan nilai DW statistik sebesar 1,839. Dengan sampel 24 (n=24) sementara besarnya jumlah variabel bebas (independen) sebanyak 4, diperoleh DW tabel sebesar 1,775. Karena nilai DW statistik lebih besar dari nilai DW tabel 1,775 ( $1,839 > 1,775$ ), maka dapat disimpulkan data tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi.

**Koefisien Determinasi**

**Tabel 6**  
**Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.999 <sup>a</sup>	.999	.998	.00429

Berdasarkan Tabel 6 di atas, dapat dilihat nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,998 yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel tingkat kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan dengan pusat (DAU), belanja modal dan temuan audit BPK adalah sebesar 99,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen sudah mewakili variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini.

**Uji F-Test**

**Tabel 7**  
**Hasil Uji F**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.250	4	.062	3395.534	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.000	19	.000		
	Total	.250	23			

Dari uji Anova atau *F Test* di atas, dapat dilihat nilai  $F_{hitung}$  sebesar 3395,534 sedangkan untuk  $F_{tabel}$  sebesar 2,90 atau ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ) dengan signifikansi yaitu sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi untuk lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, belanja modal dan temuan audit bpk secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel kinerja pemerintah daerah di pulau sumba.

**Uji T-Test**

Dari analisis uji T di atas dapat diketahui bahwa konstanta sebesar 0,042, artinya tingkat kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan dengan pusat (DAU), belanja modal dan temuan audit BPK nilainya adalah nol, maka kinerja pemerintah daerah (Y) nilainya adalah 0,042. Koefisien regresi variabel T\_PAD sebesar 0,790, artinya jika PAD mengalami kenaikan 1% maka kinerja

pemerintah daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,790 dengan asumsi variabel independen yang lain nilainya tetap. Koefisien regresi variabel TK\_DAU sebesar 0,976, artinya jika TK\_DAU mengalami kenaikan sebesar 1% maka kinerja pemda akan mengalami kenaikan sebesar 0,976 dengan asumsi variabel independen yang lain nilainya tetap. Koefisien regresi variabel Belanja Modal (BM) sebesar 0,958, artinya jika belanja modal mengalami kenaikan sebesar 1% maka kinerja pemda akan mengalami kenaikan sebesar 0,958 dengan asumsi variabel independen yang lain nilainya tetap. Koefisien regresi variabel TA\_BPK sebesar 0,537, artinya jika temuan audit BPK mengalami kenaikan sebesar 1% maka kinerja pemda akan mengalami kenaikan sebesar 0,537 dengan asumsi variabel independen yang lain nilainya tetap. Selanjutnya, menguji koefisien regresi secara parsial diantaranya T\_PAD, TK\_DAU, BM dan TA\_BPK berpengaruh terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Uji T dilakukan dengan membandingkan nilai  $T_{hitung}$  dengan  $T_{tabel}$ . Uji T dapat juga ditentukan dengan melihat nilai probabilitas signifikan t masing-masing variabel yang tercantum dalam output regresi. Jika nilai probabilitas signifikan t lebih kecil dari 0,05 maka dapat dijelaskan bahwa ada pengaruh yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji T-test**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized		Standardized		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	.042	.009		4.913	.000
T_PAD	.790	.066	.122	11.942	.000
TK_DAU	.976	.011	.894	92.739	.000
BM	.958	.013	.762	75.677	.000
TA_BPK	.537	.145	.036	3.705	.002

Hasil uji T di atas dapat dijelaskan bahwa variabel T\_PAD memiliki nilai  $T_{hitung}$  sebesar 11,942 dan  $T_{tabel}$  sebesar 2,09302 dengan demikian  $T_{hitung} > T_{tabel}$ , dapat disimpulkan bahwa variabel T\_PAD berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Pulau Sumba. Berdasarkan taraf signifikansi juga dapat dilihat bahwa variabel T\_PAD dengan nilai signifikan 0,000 yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen.

Variabel TK\_DAU memiliki nilai  $T_{hitung}$  sebesar 92,739 dan  $T_{tabel}$  sebesar 2,09302 dengan demikian  $T_{hitung} > T_{tabel}$ , dapat disimpulkan bahwa variabel TK\_DAU berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Pulau Sumba. Dari analisis tersebut dapat dilihat nilai signifikansi TK\_DAU sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dapat dikatakan terdapat pengaruh antara variabel TK\_DAU dengan kinerja pemda di Pulau Sumba.

Variabel Belanja Modal (BM) dapat dilihat bahwa nilai dari  $T_{hitung}$  sebesar 75,677 dan  $T_{tabel}$  sebesar 2,09302 dengan demikian  $T_{hitung} > T_{tabel}$ . Dapat disimpulkan bahwa variabel BM (belanja modal) berpengaruh terhadap kinerja Pemda di Pulau Sumba. Berdasarkan analisis diketahui bahwa taraf signifikansi variabel BM (belanja modal) sebesar 0,000 yang berarti berada dibawah taraf signifikansi 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa belanja modal (BM) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Pulau Sumba.

Selanjutnya, variabel TA\_BPK (temuan audit BPK) memiliki nilai  $T_{hitung}$  sebesar 3,705 dan  $T_{tabel}$  sebesar 2,09302 artinya bahwa  $T_{hitung} > T_{tabel}$ , dapat

dijelaskan bahwa variabel TA\_BPK berpengaruh terhadap kinerja Pemda di Pulau Sumba. Kemudian berdasarkan taraf signifikansi dapat dilihat bahwa TA\_BPK berada dalam signifikansi 0,002 yang berarti dibawah taraf signifikansi 0,05. Hal ini dapat disimpulkan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja Pemda di Pulau Sumba.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba.**

Berdasarkan hasil analisis SPSS seperti yang tercantum dalam Tabel 7 dan 8 menjelaskan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Pulau Sumba. Artinya bahwa pemerintah daerah di Pulau Sumba sudah cukup mampu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, walaupun rata-rata pertumbuhan PAD pada pemda di Pulau Sumba hanya sebesar 4% seperti yang tercantum analisis deskriptif pada Tabel 1. Dengan kontribusi PAD yang terus meningkat terhadap pendapatan daerah, pemerintah daerah akan lebih bebas dan mandiri untuk mengelola dan mengatur segala penyelenggaraan pemerintahan guna peningkatan pembangunan dan pelayanan publik. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD, hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerah. Dengan lancarnya penyelenggaraan urusan daerah maka pemda menunjukkan kinerja yang baik kepada publik dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat (Juliawati, *et al.*2012).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh penelitian Julitawati dan Jalaludin (2012), Marfiana dan Kurniasih (2013), Mustikarini dan Fitriarsari (2012) serta penelitian Simanullang (2013) yang menyatakan pendapatan pemda yang ditinjau dari tingkat PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kusumawardani (2012) menyimpulkan bahwa tingkat kemakmuran daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah yang menunjukkan kinerjanya untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri serta mengelola pendapatan tersebut untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat (*principal*) sehingga pemerintah daerah telah menunjukkan signal kepada masyarakat bahwa telah berkinerja dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh pemerintah daerah di Pulau Sumba, maka kinerja dari Pemda itu sendiri akan meningkat karena kemampuan dari pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola potensi-potensi kekayaan yang ada pada daerah itu sendiri.

#### **Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba**

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 7 dan 8 menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja pemda di Pulau Sumba. Tingkat ketergantungan Pemda terhadap pemerintah pusat menunjukkan tentang seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pendapatan transfer (*intergovernmental revenue*) dari pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan Pemda terhadap pemerintah pusat menunjukkan tentang seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap

pendapatan transfer (*intergovernmental revenue*) dari pemerintah pusat. Berdasarkan deskripsi statistik yang ditunjukkan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa data tingkat ketergantungan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah cukup tinggi sebesar 67% hasil ini menjelaskan bahwa transfer DAU masih cukup tinggi dalam menunjang urusan penyelenggaraan pemerintahan di Pulau Sumba. Dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa porsi Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *netto* yang ditetapkan dalam APBN. DAU yang bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan sepenuhnya diserahkan kepada daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka desentralisasi. Pemerintah Pusat akan memantau apa yang dilakukan Pemerintah daerah dan tingkat pencapaian kinerja atas alokasi dana umum dan dana khusus dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian, semakin meningkatnya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat maka pemerintah daerah diharapkan lebih semakin baik pelayanan kepada masyarakatnya sehingga kinerja Pemda juga semakin meningkat. Hasil penelitian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Julitawati dan Jalaludin (2012) mengungkapkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Serta penelitian ini didukung dengan penelitian Marfiana dan Kurniasih (2013) dan Penelitian Martani *et al.* (2014) menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrarti (2011) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan korelasi yang cukup kuat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Tingkat ketergantungan yang tinggi cenderung meningkatkan tingkat pengungkapan. Berdasarkan *Teori stewardship* menjelaskan bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Ini mengindikasikan bahwa Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan yang diamanahkan oleh pemerintah pusat kepadanya, sehingga diharapkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba**

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 7 dan 8 di peroleh bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten di Pulau Sumba. Hal ini menjelaskan bahwa belanja modal dialokasikan berdasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk penyediaan fasilitas publik. Terserapnya belanja modal yang maksimal oleh pemerintah daerah (*steward*) untuk penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat (*principal*), akan menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang maksimal. Seperti yang tercantum dalam hasil deskriptif statistik pada Tabel 1 yang menunjukkan rata-rata belanja modal pada Pemda di Pulau Sumba 30% dari total anggaran, kondisi ini menjelaskan bahwa penyerapan belanja modal pada pemerintah daerah di Pulau Sumba sudah cukup maksimal hal ini dikarenakan karena terdapat dua (2) kabupaten yakni Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya yang baru mekar menjadi kabupaten baru sehingga penyerapan anggaran belanja khususnya belanja modal untuk penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum lebih terserap untuk pembangunan daerah tersebut.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Marfiana dan Kurniasih (2013) yang menemukan bahwa jumlah belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menjelaskan bahwa pemda dengan total belanja daerah yang besar ternyata tingkat kinerja semakin tidak baik. Maupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanullang (2013) yang menyatakan secara parsial bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan belanja modal yang besar mencerminkan penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Semakin banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (*steward*) akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (*principal*), dengan demikian kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri akan lebih baik.

### **Pengaruh Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba**

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 7 dan 8 menyimpulkan bahwa temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di pulau Sumba. pengelolaan keuangan Negara yang di percayakan publik kepada pemda tersebut. Variabel temuan audit BPK membuktikan bahwa semakin besar jumlah temuan audit pada suatu laporan keuangan pemerintah daerah akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Felix dan Akoko (2012), Mustikarini dan Fitriasari (2012) dan penelitian Marfiana dan Kurniasih (2013) yang menyimpulkan bahwa temuan audit merupakan unsur yang mempunyai pengaruh terhadap penilaian kinerja pada pemerintah daerah.

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah menggambarkan semakin menurunnya kinerja dari pemerintah daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja pemerintah daerah. Teori *signaling* menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat berkeinginan menunjukkan *signal* kepada masyarakat. Pemerintah akan memberikan *signal* kepada publik dengan cara memberikan laporan penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang berkualitas. Dengan memberikan informasi kinerja pengelolaan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menemukan adanya pengaruh antara tingkat kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Pulau Sumba. Artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin tinggi dan mampu digali serta dikelola oleh pemerintah daerah sebagai pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik akan menampilkan kinerja pemerintah daerah yang baik.
2. Variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang dijelaskan dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Secara empiris menjelaskan bahwa

tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Pulau Sumba, hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah melalui transfer dana DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah akan lebih dituntut lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien serta bertanggung jawab akan menampilkan kinerja pemerintah daerah yang baik.

3. Variabel Belanja Modal hasil penelitian ini secara empiris menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Pulau Sumba. Hal ini menjelaskan bahwa anggaran belanja modal pemerintah daerah di Pulau Sumba yang direalisasikan untuk penyediaan fasilitas publik dan pembangunan infrastruktur sebagai pelayanan kepada publik akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah di Pulau Sumba.
4. Variabel temuan audit BPK membuktikan secara empiris bahwa temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Pulau Sumba. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan semakin besarnya temuan audit BPK terhadap suatu laporan keuangan pemerintah daerah maka menunjukkan semakin lemahnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, semakin kecilnya temuan audit oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah maka menunjukkan semakin kuatnya kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Sumba.

#### **Keterbatasan dan Saran Penelitian**

1. Populasi dalam penelitian tergolong kecil hanya menyertakan empat pemerintah daerah kabupaten di Pulau Sumba yakni Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk menyertakan seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur sebagai populasi dalam penelitian.
2. Pada penelitian ini laporan pemeringkatan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) untuk pemerintah daerah Tahun 2014 belum di terbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga penelitian ini hanya mencantumkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dari Tahun 2010-2013. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan data EKPPD yang terus di perbaharui oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahun.
3. Variabel karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini masih tergolong sedikit, sebaiknya untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan lagi dengan menambahkan variabel *leverage* sebagai variabel independen.
4. Pengumpulan data dalam penelitian ini yang cukup lama sekitar satu bulan lebih karena tidak semua data yang dibutuhkan oleh peneliti dipublikasikan dalam website resmi pemerintah daerah di Pulau Sumba, sehingga peneliti harus terjun langsung untuk mengambil data pada setiap pemerintah daerah kabupaten di Pulau Sumba. Penelitian selanjutnya dapat mengklasifikasikan lagi untuk setiap pemerintah daerah dengan publikasi data-data yang lengkap pada website resmi pemerintah daerah, sehingga peneliti lebih mudah dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI*, 16-17.
- Agung, Rai I Gusti. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- A.Hall, James. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat, Jakarta.
- Amin, Rahmanurrajjid. 2008. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen). *Tesis*, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Andre; Sulistiyowati, dan Mahsun. 2012. *Akutansi Sektor Publik*, Edisi ketiga, BPFE: Yogyakarta.
- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa Tengah). Universitas Diponegoro. Semarang.
- Bambang R. 2008. *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Bisma, I Dewa Gde dan Susanto, Hery. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Jurnal Akuntansi*. No. 3
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Pedoman Untuk Eksekutif dan Legislatif, Rangkuman 7 Undang-Undang, 30 Peraturan Pemerintah dan 15 Permendagri. Indeks, Jakarta.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Unhas Makasar.
- Diani Mardisar, dan Ria Nelly Sari. 2007 "Pengaruh Akuntabilitas dan Pengetahuan Terhadap Kualitas Hasil Kerja Audit", *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.
- Donaldson, Lex, dan Davis James H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Return. *Australian Journal of Management*. Vol.16.
- Felix, Olurankinse dan Akoko, Akungba. 2012. Due Process and Budget Implementation: An Evaluation of Nigerian Public Sector Auditing. *Asian Journal of Finance & Accounting*. ISSN 1946-052X. Vol. 4, No. 2.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis MultiVariate Dengan Program SPSS Edisi ke 3*. Semarang.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilardi, Fabrizio. 2001. Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation. *Paper presented at the ECPR General Conference*, Canterbury (UK).
- Gudono, 2009. *Teori Organisasi*. Pensil. Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar. 2000. *Ekonometri Dasar*, Erlangga. Jakarta.

- Halachmi, Arie. 2005. Performance measurement is only one way of managing performance. *International Journal of Productivity and Performance Management*. Vol. 54.
- Halim, Abdul, dan Abdullah, Syukuriy. 2005. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: (sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi).
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat. Jakarta.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Indrarti, Nuansa Mega Okky. 2011. Hubungan Antara Opini Audit Pada Laporan Keuangan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Universitas Riau*.
- Jensen, M dan W. Meckling. 1976. Theory Of The Firm; Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Jurnal of Financial Economic*, p 305-360.
- Julitawati, Ebit dan Darwanis, Jalaludin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*. pp 15-29.
- Keputusan Menteri dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Krina. P, Loina, Lalolo. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. *Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kusumawardani. Media. 2012. 'Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia'. *Accounting Analysis Journal 1*. Universitas Negeri Semarang.
- Lesmana, Sigit I. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. *Thesis*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Mamesah, 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Cetakan Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2006. Perwujudan Tranparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: suatu sarana good governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah vol.2 no.1*, Hal 1-17.
- Martani, Dwi dan Annisa, Lestiani. 2012. Disclosure in Local Government Financial Statements: the Case of Indonesia. *Global Review of Accounting and Finance*. Vol. 3. No. 1. pp. 67 – 84.
- \_\_\_\_\_, Dwi. Fitriasaki dan Annisa. 2014. Financial and Performance Transparency On the Local Government Websites In Indonesia. *Department of Accounting*. Faculty of Economics. Universitas Indonesia. Indonesia. Vol. 60 No. 3. ISSN: 1992-8645 E-ISSN: 1817-3195.
- Moe, T. M. 1984. The New Economic of Oranization. *American Journal of Political Science*, Vol 28 No. 5; 739-777.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriasaki, Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Forum: *Simposium Nasional Akuntansi 15*.



- Morgan, David.L. 1996. Annual Reviews of Sociology. *Annual Reviews, Institute on Aging, School of Urban and Public Affairs, Portland State University, Oregon 97201. Vol 22.*
- Nuraeni dan Dwi, Martani. 2012. The Impact Of Local Governments Characteristics Toward Their Audit Quality For Financial Reports Of 2008-2009. *3rd International Conference On Business And Economic Research ( 3rd Icbcr 2012 ) Proceeding.* ISBN: 978-967-5705-05-2.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  
 \_\_\_\_\_ 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Podrug, N. 2011. “*The Strategic Role Of Managerial Stewardship Behaviour For Achieving Corporate Citizenship*”, *Ekonomski Pregled*, Vol. 62.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang RI No. 22 tahun 1999 tentang Pemeintah Daerah*  
 \_\_\_\_\_ . 2003. *Undang-undang RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*  
 \_\_\_\_\_ . 2004. *Undang-undang RI No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara*  
 \_\_\_\_\_.(2004). *Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*  
 \_\_\_\_\_ . 2004. *Undang-Undang RI No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi: Struktur Desain dan Aplikasi.* Penerbit Arcan. Jakarta.
- Rutoto, Sabar. 2007. *Pengantar Metodologi Penelitian.* FKIP: Universitas Muria Kudus.
- Scott, Besley dan Eugene F Brigham. 2008. *Essential of Managerial Finance. Fourteen Edition.* New Jersey:Pearson-Prentice Hall.
- Sadjiarto, Adjie. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.2.*
- Simanulang, Gideon. 2013. Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah kota Dan Kabupaten Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2012. *Umrah Journal Of Accounting.* Fakultas Ekonomi. Universitas Maritim Raja Ali Haji.1-24.
- Sugiyono. 2014. “Metode Penelitian dan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D”. Alfabeta, Bandung.
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar.* Bumi Aksara, Bandung.
- Warsito, Utomo. 2002. *Dinamika Administrasi Publik.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Westin, Susan S. 1998. *Performance Measuremnt and Evaluation Definition and Relationship.* GAO issued May 2005.
- Wolk, Harry I., Michael G. Tearney, dan James L Dodd. 2000. *Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach.* South-Western College Publishing.